

Judul : Tajuk : Bisnis PCR Semakin Terdepan
Tanggal : Rabu, 27 Oktober 2021
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

Tajuk

Bisnis PCR Semakin Terdepan



rojo aktif melakukan percepatan dan perluasan vaksinasi gratis untuk rakyat. Tapi kami kecewa dengan kewajiban tes PCR." Demikian Ketua Satgas Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP Projo, Panel Barus, meluapkan kekecewaannya terhadap kebijakan yang ditelurkan lewat Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-2019 di Wilayah Jawa dan Bali tersebut.

Respons yang sama juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah fraksi DPR. Apa yang mereka sampaikan selaras dengan kekecewaan masyarakat luas yang merasakan kewajiban PCR untuk pengguna transportasi udara semakin memberatkan mereka.

Di sisi lain secara rasional kebijakan ini menimbulkan tanda tanya karena tidak sinkron dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Karena itu dalam berbagai komentar publik di dunia maya muncul kecurigaan yang terbelak ekstrem, bahwa kewajiban PCR bagi pengguna transportasi udara hanya untuk melayani kepentingan mafia PCR. Di sisi lain negara mengabaikan kepentingan lain yang lebih besar.

Mengapa tidak sinkron? Kewajiban PCR tentu bertentangan dengan semangat vaksinasi seperti disampaikan Projo. Masyarakat dan semua komponen bangsa bersemangat mendorong vaksinasi massal secepat mungkin dengan harapan semakin cepat terwujud *herd immunity* dan masyarakat bisa melakukan aktivitas secara normal.

Dengan demikian masyarakat yang sudah melakukan vaksin, terutama yang sudah 2 kali, selayaknya tidak lagi dibebani PCR. Bukankah vaksinasi diarahkan untuk menciptakan kekebalan tubuh? Jika ternyata masih diwajibkan PCR, mereka pasti akan bertanya apa manfaatnya vaksin? Sampai kapan harus terus PCR dan berapa banyak duit yang harus dikeluarkan?

Karena itu sebenarnya cukup mereka melakukan verifikasi aplikasi PeduliLindungi dan kewajiban mematuhi protokol kesehatan. Kalau *toh* ada persoalan dengan sistem atau implementasinya, tidak sepatutnya beban dilimpahkan ke publik. Adapun bagi yang belum divaksin atau belum lengkap, tentu kewajiban PCR harus dilaksanakan. Jadi jangan disamaratakan antara yang sudah dengan yang belum divaksin.

Kewajiban vaksin juga bertabrakan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Untuk mewujudkankannya, strategi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menggariskan tiga kebijakan, yakni peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter.

Ketiga kebijakan tersebut tentu punya benang merah yang sama, yakni bagaimana ekonomi bisa bergerak, selaras dengan kebijakan pemerintah melawan pandemi. Dengan demikian antara dua variabel tersebut tidak boleh saling menegasikan. Upaya melawan pandemi penting, tetapi menggairahkan kembali sektor ekonomi juga sama penting. Kematian akibat pandemi memang sangat memprihatinkan, tetapi kematian kehidupan masyarakat akibat berlarutnya kehancuran sektor ekonomi tidaklah kalah membahayakan.



Pandemi sudah dua tahun melanda dan sudah meremukkan perekonomian. Diantara yang menjadi korban karena terhentinya mobilitas masyarakat adalah industri maskapai dan pariwisata. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk misalnya. Maskapai pelat merah tersebut dilaporkan mengalami kerugian lebih dari Rp13 triliun pada semester I/2021. Kerugian yang dialami sudah pasti akan berimbas pada hilangnya kontribusi untuk negara dan justru menjadi beban baru karyawan saja. Tak kalah parah nya adalah kehancuran sektor wisata. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memproyeksikan industri pariwisata mengalami kerugian Rp50 triliun per bulan. Mayoritas berasal dari kerugian industri pendukung pariwisata seperti UKM, pangan, transportasi, ekonomi kreatif.

Kewajiban PCR sudah pasti akan melanjutkan keterpurukan tersebut. Pembatasan harga PCR maksimal Rp300.000 justru membuka kotak pandora betapa besarnya keuntungan yang diperoleh mereka yang berebut bisnis PCR, sebaliknya betapa ter-eksploitasinya masyarakat. Berlanjutnya kewajiban PCR tanpa pandang bulu seolah menegaskan bahwa industri maskapai, sektor pariwisata, dan kehidupan perekonomian masyarakat luas boleh sekarat asal bisnis PCR semakin terdepan! ☐